

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdebatan menyangkut ruang lingkup keamanan sebagai disiplin ilmu telah berjalan secara dinamis semenjak era 1990 ditandai runtuhnya tembok Berlin serta berakhirnya Soviet sebagai penyeimbang Amerika Serikat semasa perang dingin lalu. Konsep keamanan kemudian menjadi sebuah konsep yang multi interpretatif. Keamanan bukanlah dominasi pertahanan (*defense*) serta perang sebagai konsep utama, namun juga membuka ruang terhadap konsep yang lebih luas yang meliputi isu politik termasuk didalamnya perpaduan antara ancaman militer dan non militer.¹

Berangkat sebagai konsep yang multitafsir, konsep keamanan akhirnya tidak memiliki definisi yang bersifat universal. Hal ini tidak lepas karena berbagai pengaruh yang melandasi didalamnya. Pendefinisian keamanan menurut P. Savravanamutu, sangat dipengaruhi oleh ideologi serta jangkauan waktu yang coba dipaparkan dan juga oleh faktor unit analisa yang ingin diidentifikasi.² Realis mendefinisikan keamanan secara umum sebagai upaya untuk mempertahankan wilayah kedaulatan serta upaya untuk memproteksi terhadap nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Pada prakteknya, negara sebagai unit yang bersifat heterogen senantiasa bertindak serta berperilaku mengejar kepentingan nasional diatas segalanya. Negara akan bekerjasama lebih karena dilandasi terhadap kepentingan dirinya sendiri.

Selama Perang Dingin berlangsung, keamanan (*security*) menjadi isu dominan dan berafiliasi dengan keamanan negara. Bahaya ancaman senjata nuklir yang

¹ Mely Callabero, Anthony and Ralf Emmers, *Understanding the Dynamic of Securitizing Non-Traditional Security* dalam *Non-Traditional Security in Asia*, Mely Callabero, Anthony-Ralf Emmers and Amitav Acharya (Ed), (Singapore: Nanyang Technological University, Ashgate, 2006) hal. 1

² P. Savravanamutu. *Security: an Essential Contested Concept*, unpublished research paper, Southampton University, Department of Politics. Dikutip dari Caroline Thomas. *Third World Security*, hal. 254. dalam *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*. Robert J. Art & Robert Jervis (ed) Harver Collins College Publishers. 1996.)

dipersepsikan datang dari Soviet dengan paham komunisnya menghiiasi konsep keamanan Amerika Serikat selama hampir 40 tahun sebelum akhirnya Soviet runtuh. Hal ini tidak lepas dari perkembangan paradigma realis yang menikmati era keemasannya semasa perang dingin berkecamuk. “Sistem” yang bersifat anarki menstimulasi negara untuk mengambil inisiasi untuk berperan aktif dalam politik internasional. Anarki yang dimaksud bukanlah menyangkut situasi chaos namun anarki disini diartikan sebagai ketiadaan otoritas yang mampu mengkontrol perilaku negara.³

Dalam perspektif realis, negara akan senantiasa mengejar *power*, hal ini karena *power* dipahami memiliki korelasi dengan keamanan negaranya. Upaya untuk senantiasa mengejar atau menyeimbangkan *power* menjadi arena yang tidak dapat dihindari. Menurut Jhon Baylis dan Steven Smith, dalam rangka menjaga kedaulatannya, negara akan senantiasa membangun kemampuan militer secara offensive karena hanya dengan cara inilah negara mampu menjaga dirinya sekaligus meningkatkan kapabilitasnya, hal ini karena ketiadaan kepercayaan terhadap negara lain serta keberlangsungan suatu negara tergantung pada upayanya untuk tetap *survive*.⁴ Dengan logika kemampuan *power* yang kuat, negara lain akan berpikir ulang untuk melancarkan serangan atau sekedar mengganggu wilayah kedaulatan sebuah negara, meskipun dalam sejarah ada kalanya negara yang lebih lemah dalam konteks *military power* secara gegabah mendeklarasikan perang (mengancam) terhadap negara yang dalam kapabilitas *military power* lebih kuat.⁵ Atmosfir persaingan ini kemudian melandasi hubungan antar negara yang membawa negara dalam kondisi siap siaga terhadap ancaman yang terkonstruksikan datang dari negara lain.

³ Jhon Baylis & Steven Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relation*, Third Edition, (Great Britain: Oxford University Press, 2001) hal. 302.

⁴ Ibid, hal. 303.

⁵ Joseph S Nye, Jr, *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*, (New York: Harper Collins College Publisher, 1993)

Dalam buku *The Evolution of International Security Studies*, Barry Buzan dan Lene Hansen menengahkan empat pertanyaan yang akan secara implisit ataupun eksplisit menjadi perdebatan dalam ranah studi keamanan.⁶

Pertanyaan pertama adalah apakah tetap memberikan keistimewaan kepada negara sebagai satu-satunya *referent object*. Keamanan menurut Buzan dan Hansen adalah merupakan upaya untuk mengamankan sesuatu: apakah itu negara, individu, kelompok etnik, lingkungan hidup atau bahkan keberlangsungan planet bumi itu sendiri.

Pertanyaan yang kedua, apakah juga menyertakan ancaman yang datang dari dalam serta ancaman yang datang dari luar. Hal ini penting mengingat keamanan senantiasa terikat kedalam perdebatan menyangkut kedaulatan negara serta menyangkut menempatkan ancaman dalam relasinya dengan batasan teritorial. Baik hubungan internasional ataupun studi keamanan saat ini sedang menghadapi tantangan dimana globalisasi telah mengaburkan atau bahkan meniadakan batasan-batasan menyangkut pembedaan antara ancaman yang datang dari dalam ataupun ancaman yang datangnya dari luar.

Pertanyaan ketiga adalah, apakah memperluas keamanan dari sekedar sektor militer dan penggunaan kekuatan militer. *International Security Studies* (ISS) yang ditemukan pada saat perang dingin berlangsung dimana pada masa itu diliputi oleh penguatan kapabilitas militer (baik konvensional ataupun nuklir) keamanan nasional kemudian bersinggungan dengan sektor militer dan penggunaan kekuatan militer. Seiring berkembangnya ISS, perluasan sektor termasuk didalamnya sektor ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan hidup, pembangunan dan gender.

Pertanyaan keempat adalah, melihat apakah keamanan memiliki keterikatan dengan ancaman yang dinamis, bahaya serta urgensi. Pada masa perang dingin

⁶ Barry Buzan and Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2009) hal. 10-13.

konsep keamanan nasional dibangun dalam iklim politik dimana Amerika Serikat dan barat secara lebih luas, menganggap dirinya terancam oleh kehadiran pihak musuh. Keamanan selanjutnya berkaitan dengan upaya menyerang, penaklukan, dominasi, penghancuran.⁷

Keamanan menurut Buzan dan Hansen menjadi semakin jelas berkaitan dengan tujuan politik serta norma dalam mendefinisikan keamanan sebagai sebuah konsep. Keamanan akan selalu menjadi konsep yang “memiliki garis penghubung” serta berkaitan dengan *referent object* secara khusus, lokasi eksternal ataupun internal, juga kepada satu atau beberapa sektor yang khususnya berkaitan dengan cara pandang dalam politik.

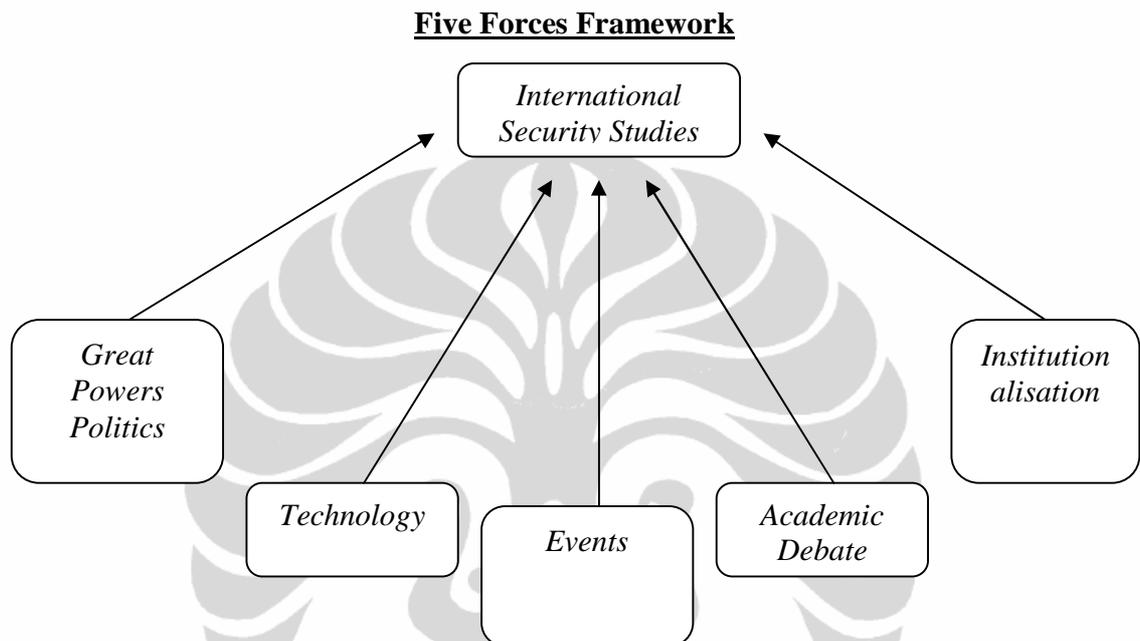
Memasuki era 1990an sebagai babak baru dari perkembangan relasi antar aktor hubungan internasional dimana negara sebagai aktor utama diikuti oleh aktor-aktor non negara yang semakin meningkat perannya membuat keamanan dalam konteks isu menjadi kian dinamis pula. Peningkatan jumlah korban yang terjangkit virus HIV AIDS, degradasi lingkungan yang ditandai oleh semakin meningkatnya permukaan air laut, kerusakan hutan, penipisan lapisan ozon atau terjadinya perang saudara, krisis politik yang berimplikasi terhadap semakin menguatnya fenomena migrasi manusia dari satu negara kenegara lain adalah deretan dari isu-isu baru yang mengemuka pada medio 1990an.

Semakin bervariasinya ancaman mungkin dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang membuat konsep keamanan perlu dilakukan perluasan. Buzan dan Hansen pun kemudian menyetengahkan lima faktor yang mempengaruhi terciptanya evolusi studi keamanan.⁸ (Buzan dan Hansen menggunakan istilah International Security Studies) kelima faktor ini adalah *great power politics, technology, event,*

⁷ Jhon Herz, “Idealist Internationalism and the Security Dillema”, *Journal of World Politics*, 2:2, 157-80, dalam Barry Buzan and Lenen Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2009), hal. 12.

⁸ Barry Buzan and Lenen Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2009), hal. 42-60.

academic debate, *Institutionalisation*, kelima hal tersebut diilustrasikan melalui gambar dibawah ini.



Kelima faktor diatas menurut Buzan dan Hansen menjadi rujukan bagi terciptanya evolusi dibidang studi keamanan. *Great Powers Politics*, menurut Buzan dan Hansen telah membingkai relasi antar negara. Rivalitas antar Amerika Serikat dan Soviet mendominasi studi keamanan selama hampir empat puluh tahun⁹. Selama kurun waktu empat puluh tahun, studi keamanan nampak jelas sangat dipengaruhi oleh relasi kedua negara besar ini. Relasi keduanya sangat mempengaruhi stabilitas dunia pada era perang dingin lalu. *Technology*, perkembangan teknologi yang semakin meningkat pesat juga memiliki kontribusi terhadap evolusi ini. Peningkatan teknologi dalam sektor militer menjadi sesuatu yang tidak dapat terbantahkan. Dari perkembangan akurasi, teknologi alat angkut yang dikembangkan untuk

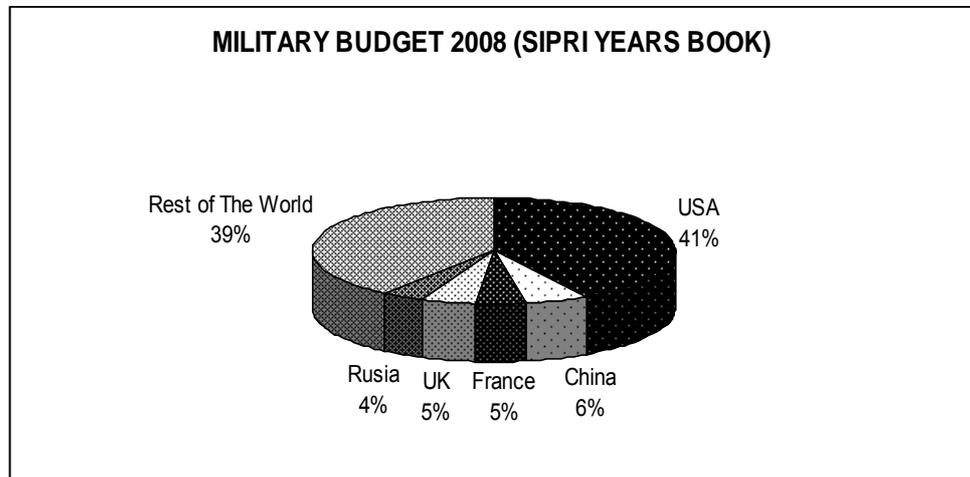
⁹ Ibid. Hal.50.

memfasilitasi peluncuran senjata nuklir yang semakin hari semakin canggih. Namun jika berkaca dari fenomena 9/11 serta lingkungan hidup, teknologi menjadi begitu sentral baik dalam konteks ancaman ataupun bagaimana mencari solusi terhadap ancaman lingkungan hidup dan fenomena 9/11¹⁰. *Events*, menurut Buzan dan Hansen, sebuah fenomena dapat mempengaruhi relasi antar negara yang memiliki *powers* namun juga mempengaruhi penggunaan paradigma untuk mengamati fenomena tersebut. *Academic Debate*, dalam ilmu sosial menurut Buzan menginterpretasikan suatu permasalahan dapat bernuansa normative ataupun analitis.¹¹ Faktor selanjutnya adalah *Institutionalisation*. *Institutionalisation* menjadi salah satu faktor menunjang terjadinya evolusi dalam studi keamanan. Buzan dan Hansen mengambil contoh fenomena munculnya institusi, seperti *think tank*, lembaga-lembaga riset seperti COPRI, program-program studi baru yang bermunculan di Universitas-universitas serta beberapa jurnal yang memiliki spesifikasi tertentu dalam upayanya menjawab fenomena munculnya isu-isu baru yang berkembang dalam ranah studi keamanan.

Selama ini konsep keamanan Amerika Serikat masih tetap diwarisi oleh konsep keamanan warisan perang dingin dimana ancaman dipersepsikan dengan datangnya serbuan atau gerak militer dari negara lain. Amerika Serikat dengan kedigdayaan militer dan anggaran militer yang besar logikanya memang mampu memberikan rasa aman bagi kedaulatan wilayah serta masyarakat yang hidup didalamnya. Anggaran militer Amerika Serikat saat ini masih menjadi yang terbesar mungkin hingga 2-3 dasawarsa kedepan. (lihat Chart)

¹⁰ Ibid. Hal.54.

¹¹ Ibid. Hal.55-56.



Sumber: SIPRI Years Book 2008, Chapters V “*Military Spending and Armsmament*” hal. 184

Dengan kekuatan finansial yang besar, maka Amerika Serikat tidak akan mengalami kendala dalam upayanya melakukan pengembangan serta pemutakhiran teknologi persenjataannya. Dengan menghabiskan anggaran sebesar \$607 miliar, Amerika Serikat berada di peringkat pertama dengan porsi 41% dari jumlah keseluruhan total anggaran pertahanan negara-negara yang ada di dunia. Maka tidaklah berlebihan jika dari segi pencapaian teknologi serta kapabilitas militer Amerika Serikat senantiasa mendominasi. Ditambah lagi oleh keberadaan persenjataan nuklir yang telah dimiliki, Amerika Serikat kemudian menjadi sebuah negara yang mendominasi percaturan politik internasional hingga hari ini.

Peningkatan serta pemutakhiran persenjataan nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah upaya untuk melakukan perimbangan kekuatan yang disebabkan oleh rivalitas yang terjadi antara Amerika Serikat dan Soviet pada masa perang dingin. Amerika Serikat mengandalkan peningkatan mesin-mesin perang yang canggih dengan tujuan agar pihak lawan akan berpikir ulang ketika memutuskan

untuk menyerang Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya.¹² Berikut ini adalah tabel tentang jumlah persenjataan nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

Tabel 1.1
U.S. Strategic Nuclear Forces Under START I and
START II

System	Launchers	Accountable Warheads ^(a)	Launcers	Accountable Warheads
Minuteman III ICBMs	500	1.200	500	500
Peacekeepers ICBMs	50	500	0	0
Trident I Missiles	168	1.008	0	0
Trident II Missiles	264	2.112	336	1.680
B-52 H Bombers (ALCM)	97	970	76	940
B-52 H Bombers (non ALCM)	47	47	0	0
B-1 Bombers ^(a)	90	90	0	0
B-2 Bombers	20	20	21	336
Total	1.236	5.947	933	3.456

Sumber: U.S. Department of State, Fact Sheet; CRS Estimates

(a) Under START I, bombers that are not equipped to carry ALCMs count as one warhead, even if they can carry up to 16 nuclear bombs; bombers that are equipped to carry up to 20 ALCMs. With these weapons included in total, U.S. strategic nuclear forces can carry around 7.100 warheads. Under START II, bombers would have counted as the number of weapon they were equipped to carry.

(b) Although they still count under START I, B-1 bombers are no longer equipped for nuclear missions. Furthermore, the Air Force plans to reduce the B-1 fleet to 60 aircraft.

Kapabilitas senjata nuklir yang dimiliki Amerika Serikat telah menciptakan sebuah stabilitas keamanan yang berlangsung selama perang dingin terjadi. *Nuclear retaliation, deterrence*, menjadi semacam garansi bagi keamanan Amerika Serikat dalam menjaga wilayahnya dari ancaman yang datang. Menurut Thomas C. Schelling

¹² Joseph S. Nye, Jr, *Understanding Internasional Conflicts: An Introduction to Theory and History*, (New York: Harper Collins College Publishers, 1993), hal. 121-122.

sebuah negara bahkan tidak lagi membutuhkan tawar-menawar ketika memiliki kekuatan militer yang cukup.¹³

Namun kini Amerika Serikat hidup dalam lingkungan yang berbeda, dunia mengalami sebuah transformasi yang sangat cepat, bagi Amerika Serikat sendiri ancaman keamanan yang sangat serius kini datang dari migrasi ilegal, teroris, kartel obat bius dan organisasi kejahatan yang terorganisir.¹⁴

Ancaman yang datang kini telah mengalami perubahan, penyerangan terhadap gedung WTC telah dilakukan semenjak tahun 1993, perang melawan bahaya obat bius (*war on Drugs*) bahkan telah dilakukan jauh semenjak masa pemerintahan presiden Nixon dan hingga kini perang terhadap tersebut masih tetap berlangsung. Segegap kemampuan yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam kapabilitas Ekonomi dan Militer memiliki keterbatasan dalam merespon ancaman yang datang dari aktor-aktor non negara ini.

Saat ini migrasi ilegal pun menjadi sebuah permasalahan keamanan yang terjadi di Amerika Serikat, peningkatan angka pengangguran serta resesi yang melanda Amerika Serikat menjadi lahan subur dari tumbuhnya angka kejahatan. Data Department of Homeland Security menyebutkan, angka kejahatan yang dilakukan oleh para imigran ilegal mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. 35 % (38.882 orang) dari jumlah para imigran ilegal yang akhirnya dideportasi (97.133 orang) adalah para imigran yang melakukan tindakan kejahatan yang berkorelasi dengan obat bius.¹⁵

¹³ Thomas C. Schelling, *The Diplomacy of Violence*, dalam Robert C. Art and Robert Jervis (ed), *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*, Fourth Edition, (New York: Harper Collins: 1996) hal. 168

¹⁴ Ralph Peters, "After The Revolution", dalam *Military Journal Parameters* 22 (the official quarterly of the U.S. Army War College) 1995, hal.11-14, dikutip dari, Peter Andreas & Richard Price, "From War Fighting to Crime Fighting: Transforming The American National Security State", *Journal International Security Studies Review*, Vol. 3, No. 3 (Autumn 2001) hal. 31-52.

¹⁵ (Department of Homeland Security) 2009 Annual Report: *Immigration Enforcement Action* 2008. hal. 4

Mencermati yang terjadi pada era akhir 1980 hingga 1990 awal, menurut Peter Andreas telah terjadi redefinisi menyangkut isu keamanan, kemudian membawa upaya misi pengamanan menjadi bagian dari kepentingan nasional dan menyebabkan keterlibatan militer dalam aktivitas keamanan yang non konvensional.¹⁶ Inisiasi perubahan ini kemudian dikonsolidasikan dan secara berkala menjadi acuan bagi para aparat keamanan nasional Amerika Serikat.¹⁷

Myron Wiener mengidentifikasi migrasi sebagai sebuah ancaman keamanan nyata dengan mengatakan bahwa “pada banyak negara, masyarakat saat ini menjadi khawatir bahwa mereka telah diinvasi bukan dengan tank dan tentara, namun oleh para imigran yang berbicara dengan bahasa yang berbeda, beragama serta menjalankan ritual keagamaan yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda pula dan mereka khawatir bahwa para imigran ini akan merebut pekerjaan, mengokupasi tanah serta gaya hidup dan sistem kemakmuran yang mereka miliki”.¹⁸

Jef Huysmans berpendapat bahwa isu migrasi ini berimplikasi terhadap identitas budaya demikian pula terhadap identitas kolektif. Dalam sektor sosial dan budaya, para imigran digambarkan secara jelas sebagai ancaman terhadap cara hidup masyarakat atau populasi “asli”. Menurut Huysmans, permasalahannya bukan hanya pada individu yang merasa terancam terhadap keberadaan pihak asing, namun juga rasa tidak aman masyarakat secara kolektif.¹⁹

Beberapa negara dikawasan selatan Eropa selepas berakhirnya Perang Dingin ditenggarai menghadapi tekanan dari semakin meningkatnya skala imigran yang datang ke wilayah kedaulatannya. Mengutip Barry Buzan: “Masyarakat Eropa kerap

¹⁶ Peter Andreas, “From War Fighting to Crime Fighting: Transforming the American National Security State,” *International Studies Reviews*, Vol. 3. no. 3 (Autumn 2001) pp. 31-52.

¹⁷ Ibid, hal. 35.

¹⁸ Myron Wiener, *The Global Migration Crisis: Challenges to State and Human Rights*, (New York: Harpers Collins) hal. 2.

¹⁹ Jef Huysmans, “Migrants as a Security Problems: Dangers of “Securitising” Societal Issues,” dalam Robert Miles and Dietrich Thranhardt (ed) *Migration and European Integration: The Dynamic of Exclusion*, (London: Pinter, 1995) hal. 53-61.

bersikap sensitif terhadap imigran muslim yang kuat dan memegang teguh budayanya. Budaya ini kemudian menjadi halangan terhadap proses integrasi bahkan cenderung dianggap sebagai sebuah penyimpangan dari budaya yang telah ada atau dianut oleh masyarakat Eropa. Penyimpangan ini pun kemudian dianggap sebagai perwujudan invasi terhadap masyarakat Eropa”.²⁰

Berdasarkan data dari UNHCR (United Nation High Commission for Refugee) dan IOM (International Organization for Migration), jumlah migrasi manusia secara internasional²¹ di dunia telah meningkat dari 66 juta jiwa pada tahun 1960, menjadi 191 juta di tahun 2005, meningkat 3 persen dari populasi dunia secara global, atau jika diilustrasikan sebagai sebuah negara maka arus jumlah migrasi internasional ini masuk dalam peringkat ke lima sebagai negara berpenduduk terbesar dari keseluruhan penduduk yang ada didunia.²² Dibawah ini adalah tabel menyangkut data imigran yang dilakukan secara sukarela, datang pengungsi, dan total imigran yang terkumpul yang bersumber dari UNHCR dan IOM berdasarkan tahun.

²⁰ Barry Buzan, *People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, (London: Brighton: Harvester Wheatsheaf, 1993) hal. 44.

²¹ Migrasi Internasional dapat dibedakan dalam dua kategori: *pertama*, dilakukan tidak secara sukarela atau dengan paksaan (umumnya disebut pengungsi), *kedua* dilakukan secara sukarela (umumnya disebut *economic migration*). Menggunakan istilah *push pull* dalam melihat motivasi seseorang untuk melakukan migrasi, *push* dapat dikategorikan sebagai faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang untuk mempertimbangkan meninggalkan tempat asalnya. Misalkan karena tekanan politik dari rezim yang otoriter, bencana alam, kemiskinan dll. Sedangkan *pull* dapat dikategorikan sebagai faktor yang menarik (E.S lee dalam *A Theory of Migration* menggunakan istilah *attract*) seseorang atau sekelompok orang untuk pergi kesuatu tempat. Umumnya karena faktor ekonomi dan kebebasan beragama yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan migrasi kesuatu tempat.

²² Sita Bali, *Population Movement*, dalam Paul D. Williams (ed), *Security Studies An Introduction*, (New York: Routledge), Hal. 469.

Tabel. 1.2
Jumlah Imigran dalam Tahun tertentu di Dunia

Years	Number of Voluntary Migrants (millions)	Numbers of Refugee	Total Migrant Number (million)
1960	64.2	1.8	66
1970	17.5	2	81.5
1980	91.4	8.4	99.8
1990	136.6	17.4	154
2000	162.8	12.1	174.9
2005	182.3	8.7	191

Sumber: UNHCR dan IOM

Bagi Amerika Serikat sendiri, jumlah migrasi yang datang ke wilayah Amerika Serikat pun mengalami lonjakan yang luarbiasa. Hal ini pun tidak lepas dari perubahan global, dimana manusia akan senantiasa mencari penghidupan yang lebih layak ke wilayah belahan bumi lainnya. Negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara serta Australia dan Seladia Baru menjadi tujuan bagi para imigran. Jumlah para imigran illegal yang berhasil ditangkap oleh Department of Homeland Security memang menunjukkan trend penurunan jika berdasarkan data yang ada pada table 1.3 namun tidak berarti ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat yang diakibatkan oleh migrasi illegal mengalami penurunan.

Menarik untuk melihat pendapat dari Saskia Sassen yang mengatakan bahwa fenomena migrasi adalah sebuah kasus dimana negara bangsa telah kehilangan kontrol.²³ Kehilangan kontrol terhadap wilayah kedaulatan adalah sebuah fenomena yang saat ini terjadi. Bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa kapasitas negara untuk

²³ Saskia Sassen, "Losing Control?", (New York: Columbia Press, 1996), dalam Virginie Guirandon and Galia Lahav. "A Reappraisal of the State Sovereignty Debate: The Case of Migration Control", *Journal of Coparative Social Studies*, 2000; 33; 163. hal. 3.

mengontrol arus migrasi terhadap orang-orang yang tidak diinginkan mengalami kemunduran.²⁴

Merespon ancaman keamanan yang telah termodifikasi tersebut, pemerintahan Bush Jr kemudian pada tahun 2003 menciptakan Department of Homeland Security (DHS) yang mengintegrasikan beberapa elemen yang memiliki keterkaitan dengan pelaksana pengawasan perbatasan seperti *Coast Guard*, *INS*, *Customes Service*. Dibawah ini adalah tabel menyangkut jumlah para imigran gelap yang ditangkap oleh Department of Homeland Security pada tahun anggaran 2006 hingga 2008 berdasarkan negara asal para imigran ilegal.

Tabel 1.3
Jumlah Penangkapan Imigran Ilegal Tahun Anggaran 2006-2008
Berdasarkan negara asal

Country of Nationality	2008	2007	2006
Mexico	693.592	854.261	1.057.457
Honduras	23.789	28.263	33.365
Guatemala	22.670	23.907	25.135
El Savador	17.911	19.699	46.329
Cuba	3.896	4.932	5.089
Brazil	2.649	2.902	2.957
Ecuador	2.322	1.771	1.932
Dominica Republic	1.934	2.118	3.712
Nicaragua	1.862	2.118	3.228
China, People's Republic	1.772	1.623	2.987
Colombia	1.460	1.893	1.648
Haiti	1.098	1.004	1.214

²⁴ William Cornelius, Philips Martin, James Hollifield (ed), *Controlling Immigration*, (California: Stanford University Press, 1994), dikutip dari Virginie Guirandon and Galia Lahav, "A Reappraisal of the State Sovereignty Debate: The Case of Migration Control", *Journal of Comparative Social Studies* 2000; 33; 163, hal. 3.

Peru	949	944	1.020
India	822	795	768
Other Countries	14.842	14.526	19.819
Total Apprehensions	791.568	960.756	1.206.457

Sumber: U.S. Department of Homeland Security, Enforcement Case Tracking System. Annual Report July 2009.

1.2. Rumusan Permasalahan

Amerika Serikat sebagai negara *superpower* dengan beragam kapabilitas logikanya mampu menggulangi permasalahan yang ditimbulkan oleh migrasi ilegal.

Namun dalam prakteknya arus migrasi ilegal tetap menunjukkan trend peningkatan dalam skala jumlah sekaligus ancaman keamanan didalam wilayah kedaulatan Amerika Serikat.

1.3. Pertanyaan Penelitian

“Mengapa Amerika Serikat memilih model DHS untuk mengatasi permasalahan migrasi ilegal?”

1.4. Tujuan Penelitian

- 1) Menjelaskan mengapa Amerika Serikat membentuk DHS (U.S. Department of Homeland Security) untuk menanggulangi permasalahan migrasi ilegal.
- 2) Menjelaskan (adakah) korelasi antara migrasi ilegal dengan penyebaran teroris ke wilayah Amerika Serikat.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang mengetengahkan evolusi studi keamanan ini penting bagi khasanah Hubungan Internasional terlebih Pengkajian Keamanan dan Strategi karena menyangkut kebijakan keamanan Amerika Serikat sebagai sebuah negara

Superpower dalam merespon isu keamanan yang semakin dinamis dalam bentuk ancaman salah satunya ancaman migrasi illegal.

1.6. Tinjauan Pustaka

Topik mengenai migrasi illegal adalah sebuah topik yang telah umum dibahas baik dalam jurnal-jurnal serta karya-karya ilmiah selama ini. Hasil penelusuran penulis pada perpustakaan UPD-HI Universitas Indonesia, menemukan bahwa terdapat skripsi yang memiliki tingkat kesamaan dalam konteks isu (Migrasi Illegal) serta wilayah kajian (Amerika Serikat). Skripsi yang ditulis oleh Alessandro Bernama Habinsar Simatupang dengan judul “*Pergeseran Strategy Kontrol Perbatasan Amerika Serikat Berdasarkan Strategy Keamanan Nasional 2002 Dan Dampaknya Terhadap Arus Migrasi Tenaga Kerja Illegal Dari Meksiko Ke Amerika Serikat.*” Adalah salah satu skripsi yang dapat dijadikan acuan bagi penulisan Tinjauan Pustaka.

Pada skripsi ini, Habinsar mengemukakan fenomena migrasi illegal yang secara spesifik datang dari Meksiko sebagai negara tetangga serta menganalisa terhadap perubahan kebijakan kontrol perbatasan yang berlandaskan pada *National Security Strategy* yang dilansir oleh pemerintahan Bush jr pada tahun 2002. laporan berkala ini sesuai dengan kebijakan negara Amerika Serikat dimana lembaga kepresidenan (eksekutif) senantiasa harus melakukan laporan Strategi kebijakan keamanan empat tahunan kepada Kongres Amerika Serikat yang tertuang dalam Goldwater Act (1986).

Dengan menggunakan empat teori: *Human Migration* (Buzan), *Keamanan Nasional* (Ole Waever), *Strategy Keamanan Nasional* (Hedley Bull), *Strategy Kontrol Perbatasan* (Malcolm Anderson) skripsi tersebut mencoba melihat fenomena 9/11 sebagai faktor yang mendorong terciptanya perubahan kebijakan yang berimplikasi terhadap pengetatan pengamatan wilayah perbatasan Amerika Serikat.

Pengetatan perbatasan terlebih dikawasan perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko menyebabkan arus migrasi illegal pekerja dari Meksiko menjadi kian sulit karena perubahan kebijakan perbatasan diatas.

Motivasi utama dari para tenaga kerja illegal asal Meksiko untuk datang ke wilayah Amerika Serikat lebih dipengaruhi oleh latarbelakang ekonomi. Permasalahan tenaga kerja illegal dengan latarbelakang motivasi ekonomi telah berjalan jauh kebelakang. Godaan untuk senantiasa datang ke wilayah Amerika Serikat lebih disebabkan oleh adanya kepentingan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat terhadap kebutuhan tenaga kerja yang minim dalam konteks keterampilan serta kesediaan para imigran illegal ini untuk dibayar dengan upah yang sangat minim pula.

Perbedaan yang mencolok antara penelitian yang akan coba penulis lakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh Habinsar sebelumnya adalah terletak pada Migrasi illegal sebagai variable independen (migrasi illegal secara umum bukan hanya migrasi illegal yang datang dari Meksiko yang cenderung bermotif ekonomi namun migrasi illegal secara umum yang berkorelasi dengan motivasi dibalik ekonomi) sebagai sebuah isu yang mampu merubah bukan hanya strategy kontrol perbatasan Amerika Serikat namun juga berimplikasi terhadap kebijakan keamanan Amerika Serikat paska 9/11 (variable dependen). Pembentukan Department of Homeland Security sebagai respon terhadap fenomena 9/11 ingin penulis cermati apakah memiliki korelasi yang jelas terhadap fenomena migrasi illegal.

Selanjutnya penulis juga menemukan satu artikel yang ditulis oleh Peter Andreas yang berjudul "*Redrawing The Line: Borders and Security in Twenty First Century.*" Dalam artikel yang berjudul *Redrawing The Line*, Peter Andrea memperkenalkan istilah Clandestine Transnation Actors (CTAs) yang didefinisikan sebagai aktor non negara yang beraksi lintas batas dengan menyalahi aturan yang berlaku serta berupaya untuk menghindari jeratan hukum. CTAs ini memiliki

motivasi yang berbeda pula. Ada yang memiliki motivasi dikarenakan keuntungan yang tinggi akibat permintaan yang besar dari “pasar” (contoh: penyelundup narkoba, penyelundup manusia), motivasi politik atau agama dengan melalui cara-cara kekerasan (contoh: teroris), atau termotivasi karena upaya mencari pekerjaan atau menjadi pengungsi. (migrasi illegal).

Dalam artikel ini Peter Andreas menyoroti bahwa telah terjadi perubahan signifikan terhadap upaya negara yang memandang keamanan batas wilayah dalam konteks ancaman militer. Kontrol negara terhadap batas-batas wilayah kedaulatan bahkan dianggap telah semakin memudar. Dengan memberikan beberapa contoh wilayah-wilayah perbatasan dikawasan Eropa dimana sebelum berakhirnya perang dingin upaya pengamanannya nampak militeristik kini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Menurut Peter Andrea, hal ini disebabkan oleh aktor yang memberikan ancaman tidak lagi dalam bentuk negara namun dalam bentuk aktor-aktor non negara (CTAs yang disebutkan diatas) yang juga membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.

Selanjutnya Tesis yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah Australia Mengenai Illegal Immigrant Paska Insiden Kapal Tampa*” yang ditulis oleh Agus Nilmada Azmi. Dalam tesis ini, Agus memaparkan kebijakan pemerintah Australia dalam penanganan masalah imigran illegal yang mencoba datang kewilayah Australia. Permasalahan migrasi illegal ini cukup menarik karena juga melibatkan Indonesia sebagai negara transit sebelum para illegal migran ini masuk ke wilayah Australia. Perselisihan antara kedua negara ini seperti yang dijabarkan oleh Agus memiliki pretensi untuk memperburuk Indonesia dimata dunia internasional. Hal ini terlihat jelas dengan upaya pemerintah Australia yang memaksa Indonesia sebagai negara yang bertanggungjawab terhadap permasalahan ini.

Insiden Kapal Tampa yang melibatkan para imigran illegal asal Irak dan Afganistan ini menjadi contoh kasus dimana perubahan *security environment*

berimplikasi terhadap kebijakan keamanan yang dilakukan oleh suatu negara. Agus mencoba menyoroti perubahan kebijakan keamanan imigrasi Australia yang dipengaruhi oleh fenomena 9/11. Fenomena 9/11 berimplikasi kepada pemerintahan Australia dalam merespon arus imigran ilegal. Ancaman terhadap keamanan sosial budaya, perubahan mengenai persepsi ancaman serta perumusan kebijakan luar negeri menjadi konsep-konsep utama dalam tesis ini. Dalam tesis ini pun Agus juga mengetengahkan beberapa hasil polling sebagai input kebijakan luar negeri Australia.

Tujuan dari dilakukannya penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang kemudian dijadikan sebagai Tinjauan Pustaka agar terhindar dari kesamaan topik, jangkauan penelitian, isi sekaligus memberikan demarkasi yang jelas antara karya ilmiah yang telah sebelumnya terbit dengan karya yang sedang penulis lakukan. Pada bagian akhir, penelitian ini diharapkan mampu memberikan variasi baru terhadap permasalahan migrasi ilegal dengan menggunakan perspektif yang berbeda.

1.7 Formasi Konsep

Penelitian ini menempatkan konsep keamanan sebagai konsep utama. Konsep keamanan yang penulis maksud adalah konsep keamanan yang diusung oleh Copenhagen School sebagai *school of thought* yang telah mengembangkan teori keamanan dalam tradisi konstruktivis.²⁵ Perdebatan menyangkut apakah perluasan keamanan (*Broader conception of Security*) antara para penganut keamanan tradisional serta para penganut keamanan non tradisional (*Copenhagen School*) menyangkut persepsi keamanan apa yang disebut Barry Buzan sebagai *referent object of security*:²⁶ Keamanan bagi siapa, aman dari apa, dan siapa yang mendefinisikan keamanan? Apakah keamanan itu adalah keamanan nasional yang secara sempit

²⁵ Matt McDonald, *Constructivism*, dalam Paul D. Williams (ed) *Security Studies: An Introduction*, (New York: Routledge, 2008), hal. 68.

²⁶ Barry Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, (London: Harvester Wheatsheaf Publisher, 1991)

diartikan sebagai keamanan negara (*state security*) ataukah keamanan seluruh entitas politik di bawah negara: individu, kelompok, dan seluruh elemen masyarakat? Juga, apakah keamanan tersebut diartikan sebagai aman dari ancaman militer atau ancaman-ancaman lain yang lebih luas?.²⁷

Pengabaian terhadap perlunya perubahan fokus ancaman keamanan dari bingkai persaingan Timur dan Barat dalam kerangka keamanan dan ancaman militer justru akan membuat negara (dalam hal ini Amerika Serikat) mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan konstalasi politik internasional paska perang dingin. Penyerangan 9/11 secara jelas menggambarkan bahwa ancaman tidak hanya datang dari institusi negara namun juga mungkin datang dari konteks aktor-aktor non negara yang tidak memiliki wilayah teritorial. Kapabilitas militer ternyata tidak mampu berbuat banyak dalam rangka menangkal masalah keamanan yang semakin modern serta penyerangan teroris yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Barry Buzan menawarkan sebuah agenda perluasan keamanan yang tidak hanya menempatkan negara sebagai satu-satunya *reference object*, akan tetapi membagi beberapa sektor yang kiranya membutuhkan penanganan yang lebih baik.

- a. *Military security*: memfokuskan pada dua hal yang saling mempengaruhi yakni kapabilitas militer antar negara yang bersifat *offensive* serta *defensive* serta persepsi antar keduanya.
- b. *Political security*: memfokuskan pada pengorganisasian stabilitas negara, sistem pemerintahan serta ideologi dan legitimasi terhadap pemerintah.
- c. *Economic security*: memfokuskan pada akses sumber daya, keuangan dan pasar yang berguna dalam upaya menjaga tingkat kemakmuran serta power suatu negara.

²⁷ Edy Prasetyono, *Tinjauan Konseptual Masalah Keamanan*.

- d. *Societal security*: memfokuskan pada upaya untuk tetap memelihara tradisi budaya baik dalam konteks bahasa, kultur, kebiasaan, agama dan identitas nasional.
- e. *Environmental security*: memfokuskan pada menjaga ketahanan lokal serta lingkungan secara luas yang memiliki fungsi sebagai penopang bagi keberlangsungan makhluk hidup.

Menurut Richard Ullman, asumsi yang melihat permasalahan keamanan nasional (*national security*) hanya pada sektor militer sebagai permasalahan yang primer justru menyebabkan kesalahan dalam melihat gambaran realitas.²⁸ Pengkonsentrasian hanya kepada permasalahan sektor militer menurut Ullman justru akan berimbas pada dua hal. *Pertama*, pengkonsentrasian terhadap sektor militer justru akan membuat negara fokus terhadap sektor militer dan menyebabkan negara mengabaikan sektor lain yang justru lebih mengancam ketimbang bahaya yang disebabkan oleh sektor militer. *Kedua*, pengkonsentrasian terhadap sektor militer justru berkontribusi terhadap terciptanya militerisasi dalam hubungan internasional yang pada jangka waktu panjang kelak hanya menciptakan apa yang disebut “*global insecurity*”.²⁹

1.7.1. Teori

1.7.1.1 Securitization

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori sekuritisasi (*securitization*) yang dikemukakan oleh Ole Waever. Dalam buku *On Security*, Ole Waever menyatakan bahwa: *security* sebagai “*speech act*”. Dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya spesifik

²⁸ Richard Ullman, “Redefining Security”, *Journal of International Security*, Summer1983 (Vol. 8 No.1) hal. 129.

²⁹ Ibid, hal. 129.

kemudian mengambil langkah-langkah apa pun sebagai bagian dari hak istimewanya untuk dapat menghentikannya.³⁰ Dilanjutkan dalam buku *Security: A New Framework of Analysis*, Buzan, Waever dan Jaap de Wilde mengemukakan: Keamanan adalah langkah yang dilakukan dengan melampaui aturan main secara umum dalam membingkai suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya.³¹

Sekuritisasi menurut Buzan, Waever dan Jaap de Wilde adalah sebuah bentuk ekstrem dari upaya politik. Setiap isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan yang antara lain, *nonpoliticized* yang berarti pemerintah tidak menanggapi permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam ranah publik. *Politicized*, yang berarti bahwa isu tersebut telah masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya, atau kebijakan tambahan. Selanjutnya, *to securitized*, yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman keamanan yang bersifat nyata, yang tentu saja membutuhkan tindakan yang darurat dimana penggunaan prosedur diatas prosedur politik biasa dianggap sah untuk dilakukan.³²

Selanjutnya Buzan, Waever, Jaap de Wilde mengatakan: dalam melakukan analisa keamanan, pengartikulasian keamanan membutuhkan tiga bentuk unit yang berkaitan dengan upaya analisa keamanan yang antara lain terdiri dari:

- *Referent objects*: Sesuatu yang dipandang secara nyata terancam dan berhak untuk menyatakan dirinya terancam.

³⁰ Ole Waever, *Securitization and Desecuritization*, dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) *On Security*, (New York: Columbia University Press, 1995) hal. 55.

³¹ Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework of Analysis*, (London : Lynne Rienner Publisher, 1998) hal. 23.

³² Ibid, hal. 23.

- *Securitizing actors*: Aktor yang melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu.
- *Functional actors*: Aktor yang mempengaruhi dinamisasi suatu sektor tanpa harus bertindak sebagai *referent objects* atau pun *securitizing actors*.³³

Selanjutnya teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan, Waever dan Jaap de Wilde, oleh Mely Caballero, Anthony & Ralf Emmers serta Amitav Acharya di kombinasikannya melalui beberapa langkah yang bertujuan untuk mengaplikasikan serta mengoperasionalkan teori sekuritisasi ini melalui kerangka kerja yang terdiri dari:³⁴

1. *Issue Area*: melihat apakah terdapat consensus bersama antar para aktor dalam menentukan *existential threat*.
2. *Securitizing Actors*: menentukan siapakah aktor yang melakukan sekuritisasi serta bertindak atas dasar kepentingan siapa?.
3. *Security Concept (whose security)*: konsep keamanan yang digunakan oleh aktor dalam melakukan tindakan sekuritisasi. Misal: negara melakukan sekuritisasi berlandaskan keamanan nasional, NGO (*Non-governmental Organizations*) melakukan sekuritisasi dengan berlandaskan *human security*.
4. *Process*: penggunaan *speech acts* berdampak terhadap sebuah proses sekuritisasi.
5. *Degree of Securitization*: melihat sejauhmana sekuritisasi telah dilakukan dengan menggunakan beberapa indicator, antara lain *resource allocation trends, military involvement, legislation, and institutionalization*.

³³ Ibid, hal. 36.

³⁴ Mely Caballero, Anthony & Ralf Emmers, Amitav Acharya (ed) *Non Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*, (ASGATE. 2006), hal. 6-8.

6. *Impact on the Threat*: melihat sejauhmana upaya sekuritisasi berdampak terhadap *existensial threat*.
7. *Condition Affecting Securitization*: proses sekuritisasi akan berdampak sekaligus mempengaruhi faktor-faktor lain; *Interplay of different concept of security, Lingkage between security issues, Role of powerful actors, Domestic political system, International norms*.

1.7.1.2 Threat Model

Model ancaman yang dikembangkan oleh Lani Krass dari National War College³⁵ ini melihat ancaman berdasarkan peningkatan dari tiga hal: *vulnerabilities*, *intention*, *capabilities* memberikan pemahaman bahwa perubahan yang terjadi pada tiap faktor juga akan mempengaruhi ancaman yang akan datang. Jika kerentanan (*vulnerabilities*), tujuan (*intention*) dan kapabilitas (*capabilities*) dari para musuh Amerika Serikat mengalami peningkatan akan berkorelasi dengan peningkatan ancaman (*threat*) terhadap keamanan tanah air Amerika Serikat. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan dari peningkatan intensitas ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi ancaman terhadap keamanan tanah air (dalam hal ini Amerika Serikat)

$$Vulnerabilities \times Intention \times Capabilities = Threat$$

Model ancaman ini pada awalnya digunakan untuk melihat ancaman teroris kedalam wilayah tanah air Amerika Serikat, namun kemudian penulis mencoba untuk memodifikasi model ini untuk melihat ancaman (*threat*)

³⁵ Larsen, Randall, Ruth David, "Homeland Defense: Assumptions First, Strategy Second", *Journal of Homeland Security*, ANSER Institute 2000 dalam Kristopher A. Pruitt, Richard F. Decko and Stephen P. Chambal, "Modeling Homeland Security", *The Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology*, 2004 1:187

dalam spectrum yang lebih luas yakni ancaman non tradisional sekaligus mencoba menggunakan model ini dalam spectrum yang spesifik yakni migrasi illegal. Upaya pemerintah Amerika Serikat untuk menghadapi permasalahan migrasi illegal sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum terjadinya fenomena 9/11, dari pengetatan wilayah perbatasan hingga penerbitan kebijakan imigrasi (*immigration policy*) demi upaya meminimalisir derasnya aliran migrasi illegal ke dalam wilayah kedaulatan Amerika Serikat.

Dalam konteks penerbitan regulasi imigrasi, pemerintah Amerika Serikat telah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain *Brancero Programe* (1942), *IRCA (Immigration and Reform and Control Act, 1986)* hingga melakukan *Operation Gatekeepers* pada oktober 1994. *Operation Gatekeepers* sendiri adalah upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan pengawasan patroli perbatasan di wilayah perbatasan Amerika Serikat bagian selatan dengan mengalokasikan peningkatan peralatan, teknologi, personel serta alokasi financial.³⁶

Wilayah perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko ditenggarai menjadi saluran utama dari masuknya para imigran illegal ke Amerika Serikat, pembangunan pagar pemisah antara Amerika Serikat dengan Meksiko dilakukan disepanjang wilayah perbatasan. Penambahan personel pengawasan perbatasan, hingga memodernisasi perangkat pengawasan elektronik dilakukan demi pemaksimalan pencapaian keamanan diwilayah perbatasan.

Penyerangan teroris ke dalam wilayah kedaulatan Amerika Serikat menjadi titik tolak perubahan prioritas keamanan Amerika Serikat yang kini

³⁶ Chris Burr, "Death On The Border, Illegal Migration, and The Impact of Operation Gatekeeper", Working Paper, University of San Diego, (Paper was written in partial fulfillment of the requirements of the Senior Seminar in Economics) hal. 2.

menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama.³⁷ Jika sebelumnya Amerika Serikat memfokuskan perhatian pada wilayah-wilayah yang rentan mengancam kepentingan nasionalnya sebagai bentuk dari internasionalisme maka kini pergeseran pun terjadi, wilayah Amerika Serikat menjadi rentan dan membutuhkan penanganan keamanan yang lebih baik. Pengorganisasian institusi yang bertanggung jawab terhadap kontrol perbatasan, imigrasi dan kemantapan pengawasan arus keluar-masuk menjadi begitu penting. Menempatkan tentara pada wilayah perbatasan yang sangat luas menjadi tidak efektif ketika para penyerang 9/11 justru mampu keluar masuk wilayah Amerika Serikat dengan menggunakan dokumen serta passport palsu ataupun melakukan pelanggaran ijin tinggal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Setiap tahunnya 1.3 juta orang masuk kedalam wilayah kedaulatan Amerika Serikat. Sebagian dari para pendatang ini mungkin saja para teroris yang secara jelas telah mendemostrasikan kemampuannya untuk masuk ke Amerika Serikat secara illegal.³⁸ Pembentukan Department of Homeland Security sebagai model sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Bush jr menjadi jawaban dalam merespon penyerangan teroris kedalam wilayah Amerika Serikat, reorganisasi beberapa badan yang berwenang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan proses pengamanan wilayah Amerika Serikat yang kini menghadapi permasalahan yang datang dari aktor-aktor non negara.

Kinerja INS (Immigration and Naturalisation Services) mendapatkan sorotan luar biasa paska penyerangan 9/11, tekanan publik sangat besar terhadap permasalahan imigrasi, serangan yang mendadak pada siang hari dan di

³⁷ Michele A. Flournoy, *Strengthening Homeland Security*, dalam (ed) Hans Binnendijk, *Transforming American Military*, (Washington D.C: National Defense University Press, 2002), hal. 261.

³⁸ Ibid, hal. 262.

saat yang sama diberitakan secara langsung ke seluruh dunia menjadi sebuah pemandangan yang sangat menakutkan bukan hanya kepada masyarakat sipil namun kepada para pengambil kebijakan yang khawatir bahwa serangan terhadap fasilitas vital negara akan menjadi target selanjutnya.

1.7.2. Hipotesis

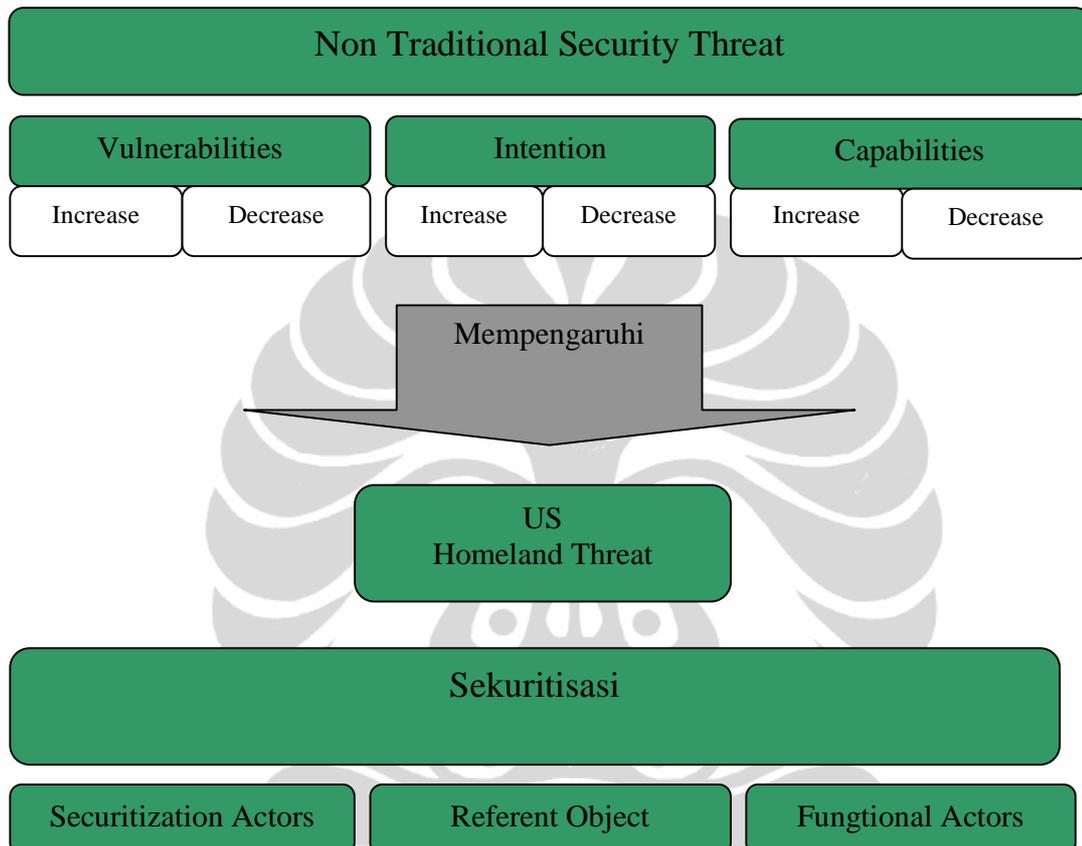
Amerika Serikat memilih model DHS (Department of Homeland Security) untuk mengatasi ancaman migrasi ilegal karena:

- DHS adalah bentuk upaya sekuritisasi Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman migrasi ilegal.
- Peningkatan ancaman (*threat*) terhadap keamanan wilayah tanah air Amerika Serikat.

1.7.3. Model Analisa



1.7.4. Operasionalisasi Konsep



1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah upaya untuk menganalisa implikasi migrasi ilegal sebagai variable independen yang mempengaruhi kebijakan keamanannya paska 9/11 sebagai variable dependen. Respon pemerintah Amerika Serikat terhadap permasalahan migrasi ilegal ini dengan melakukan upaya sekuritisasi serta melihat sejauhmana upaya sekuritisasi ini berimplikasi terhadap migrasi ilegal itu sendiri. Sebagai sebuah penelitian yang bersifat ilmiah, maka dalam penulisan penelitian ini akan lebih di fokuskan pada penggunaan metode penelitian kuantitatif.

Pemaparan yang dipilih oleh penulis adalah menggunakan analisa yang bersifat eksplanatif dimana penulis mencoba mengeksplanasi power sebagai salah satu variable yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang seharusnya mampu mengurai permasalahan ini dalam konteks pendekatan keamanan tradisional. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor serta indikator yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, untuk kemudian menjelaskan logika empiris yang diuraikan secara deduktif-induktif.³⁹

1.9. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kebijakan keamanan sebelum dan setelah 9/11.

Bab 3 Department of Homeland Security sebagai bentuk sekuritisasi terhadap migrasi illegal.

Bab 4 Kesimpulan.

³⁹ W. Lawrence Newman, *Social Research Methode: Qualitative Approaches*, (Boston: Pearson Education, Inc (Fifth edition)), 2003, hal 72